

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ardial, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014)

As-Shiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2013), Cet 5

----- *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu populer 2007)

C.S.T. Kansil, dkk, *Pokok-Pokok Hukum Pidana “Hukum Pidana Untuk Tiap Orang”*, ( Jakarta: PT. Pradnya Paramita,2007), Cet. 2

Damanhuri, *Pendidikan Kewarganegaraan*, ( Serang: Untirta Press,2014 )

Effendi, A. Mansyur, *Dimensi Dinamika Hak asasi manusia dalam hukum dalam hukum nasional dan internasional* . cet 1 : jakarta: Ghalia Indonesia.

El-Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, ( Jakarta: Kencana, 2009),

Erfandi, *Parliamentary Threshold dan HAM Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, ( Malang: Setara Pres,2014),

Ermansjah, Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*, (Jakarta : Sinar Grafika )

-----, *“Memberantas Korupsi Bersama (Komisi Pemberantas Korupsi ) KPK”* ( Jakarta : Sinar Grafika) Cet 2

F. Hasbullah, Sjawie, *Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*,(Jakarta:Kencana,2017), Cet2

- Handoyo, Eko, *Pendidikan Antikorupsi*, (yogyakarta:Ombak:IKAPI, 2013), h. 2
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- , *Kitab Undang Hukum Pidana & Kitab Undang Hukum Acara Pidana Edisi kedua*(jakarta:Rineka Cipta, 2016) cet.17
- , *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), cet 7
- , *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Edisi Revisi 2* ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Handrawan, *Pencabutan Hak Politik Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia).
- Hifdzil, Alim & Wahid Marzuki. dkk., *Jihat Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*, (Jakarta: Lakpesdam PBNU), cet. 3
- Irfan, Nurul, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:AMZAH 2014),cet 2,
- ,*Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:AMZAH,2011) Cet
- J Meleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ( Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1998)
- Kartayasa, Mansur. *Korupsi dan Pembuktian Terbalik Dari Perseptif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, ( Jakarta:Kencana, 2017), Cet 1
- Mahfud .Moh.MD, *Dasar Dan Struktural Ketatanegaraan Indonesia*, ( Jakarta:a: PT. Rineka Cipta 2001),
- Majda, El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM mengurai hak ekonomi,sosial, dan budaya*.(jakarta:PT RajaGrafindo Persada) cet ke-3

- Marzuki, Peter, Mahmud , *penelitian hukum*, : jakarta:predana media group,2005
- Pasek , I.Made, Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta:Prenadamedia Group) Cet. 3
- Qamar, Nurul, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi ( Human Rights in Democratische Rechtsstaat).*, (Jakarta: Sinar Grafika).Cet 1
- Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, ( Jakarta: Kencana, 2016), Cet 2
- Soekanto,Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif ( Suatu tinjauan Singkat)*, ( Jakarta: Rajawali pers, 2001)
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, : Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1994
- Suradi, *Korupsi Dalam Sektor Pemerintahan dan Swasta*, (Yogyakarta:Gaya Media, 2006)
- Triwulan, Titik Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amademen UUD 1945*, (Jakarta : Prenada Media, 2010), Cet 1
- Ubaedillah, A. & Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani* ,(Jakarta: Prenada Media Grup, 2014)
- , Pendidikan Kewarganegaraan ( Civil Education ) Pancasila, Demokrasi, dan pencegahan Kosupsi (Jakarta:Kencana, 2015)
- .,A.,dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan ( Civil Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2008), cet 3

Wijayanto & Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, ( Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2009)

## **B. Jurnal/Internet**

Anti Corruption Clearing House (ACCH) , <https://Acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus/55-djoko-susilo>, diakses pada tanggal 15 maret 2020 jam 06:01 WIB

KPK:Hak Politik 26 Terpidana Korupsi sudah di cabut (Tim CNN Indonesia), *M.cnnindonesia.com/nasional/20180918124512-12-331038/kpk-hak-politik-26-terpidana-korupsi-sudah-dicabut*, Diakses pada tanggal 15 maret 2020 jam 07:05

Warih, Anjari, Pencabutan Hak Politik terpidana korupsi dalam perspektif Hak Asasi Manusia, Kajian Putusan Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 1195K/Pid.Sus/2014, *Jurnal Yudisial* Vol. 8 No. 1 April 2015: 23 – 44

Alfauzi, Rangga , penjatuhkan pidana penjabutan hak politik terpidana korupsi dalam perspektif hukum pidana dan *HAM*”, ( Tesis pada program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII 2015)

Wilujeng ,Sri Rahayu, , *Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis* ( Artikel, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro)

Ulfiah, Eneng, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Humaniter Internasional*, (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2018)

Naimatul Atqiya, “*HAM Dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Islamuna* Volume 1 Nomor 2 (Desember 2014) Program Magister PAI Pascasarjana STAIN Pamekasan

## **C. Peraturan perundang-undangan**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia&Amademen Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Internation Covenant on Civil Political rights ( Konvensi Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik )